

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4234)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5150)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6811)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata-Cara
Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan
Peradilan Umum Dan Militer.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tentang Jangka Waktu Pengajuan Grasi

Naskah Akademik

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2015

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2019

Naskah Akademik RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi Tahun 2022

BUKU

C. Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Djernih Sitanggang, 2023, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit Reka Cipta, Bandung.

Eddy O.S. Hiariej, 2024, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Rajawali Press, Depok.

Erasmus A. Napitupulu, 2020, *Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas

Perempuan) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta

Iftitahsari, Adhigama Andre Budiman, dan Erasmus A. T. Napitupulu, 2024, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru*, ICJR, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta.

Nur Solikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan.

Maftuh, Rachmat P. Sutardjo, 2020, *Peran Layanan Hukum Pidana Dan Pemberian Pertimbangan Hukum Grasi pada Hak Prerogatif Presiden*, BPSDM KUMHAM Press, Depok

Maya Safira, Deni Achmad, Fristia B. Tamza, dan Muhammad H Ghiffary, 2022, *Buku Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandarlampung.

Mompang L. Pangabean, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, UKI Press, Jakarta,

Muhammad S. Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi, Banda Aceh.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,

Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi keempat, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Sigit S. Nugroho, Anik T. Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta

Supriyadi Widodo Eddyono, Napitupulu, dan Kamilah, 2016, *Update Hukuman Mati di Indonesia 2016*, ICJR, Jakarta.

Tofik Y. Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta.

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Anjarsari, W. P., “Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Volume 2, Nomor 3, 2021.

Aista Wisnu Putra dan Rahmi Dwi Sutanti, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Dientia Dinneer, “Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Penggunaan Hak Grasi Presiden Terhadap Kasus-Kasus Di Indonesia)”, *Tesis S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 2013.

Dwi Agus S, “Relevansi Hak Terpidana Mati Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali dan Grasi Terhadap Kepastian Hukum Eksekusi Pidana Mati”, *Tesis S2 Fakultas Hukum UGM*, Tahun 2018.

Khania Khairunisa dan Dey Ravena, “Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015”, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2021.

Khibran Nadhira dan Hery Firmansyah, “Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo di Sistem Hukum Pidana”, Unes Law Review, Volume 6, Nomor 2, 2023.

Leo Arwansyah, Andi Najemi, dan Aga A. Prayudi, “Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia”, PAMPAS: Journal of Criminal, Volume 1, Nomor 3, 2020.

Muhammad Andre Nurdiansyah, “Penerapan Kebijakan Komutasi Pidana Mati Pada RKUHP Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2023.

Muhammad R. Al Amin dan Mitro Subroto, “Perlakuan dan Pembinaan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan”, Innovative: Journal of Social Research, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2022.

Peter Brett, “Conditional Pardons and the Commutation of Death Sentences”, Modern Law Review, Volume 20, 1957.

Olga Nadina, “Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Mati Yang Sedang Dalam Proses Mengajukan Permohonan Grasi”, Skripsi S1, Universitas Airlangga, 2019.

Richard C. M., “Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor/107PUU-XIII/2015, Tesis S2 Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum UGM, Tahun 2022.

Siti Halilah, Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”,
Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4, No. II, 2021.

Seminar Akademik

Ikhwan Nul Hakim Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana,
“Tanggapan Atas Laporan Pendokumentasian Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan”, (Presentasi, Konsultasi Publik Laporan Pendokumentasian Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Komnas Perempuan, 4 Juli 2024).
<https://www.youtube.com/watch?v=OHUDn40zK6M>

Paramarta, Ambeg, “Perspektif Kementerian Hukum Dan HAM Terhadap Kebutuhan Kebijakan Perantara Bagi Terpidana Mati Yang Sudah Ada Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”(Presentasi, Urgensi Kebijakan Perantara Pidana Mati guna Menyongsong Keberlakuan KUHPN di Tahun 2026, Jakarta, 27 Juni 2023)
<https://www.youtube.com/watch?v=PGBnTG8TkZw>

Berita

Ristyawan Pratama, “6 Tahun Lalu, Hukuman Mati Freddy Budiman Dalang Pabrik Sabu dalam LP Cipinang”, Tempo. Diakses 28 Mei 2024 dari
<https://nasional.tempo.co/read/1617216/6-tahun-lalu-hukuman-mati-freddy-budiman-dalang-pabrik-sabu-dalam-lp-cipinang>

Tim detik.com, “Perjalanan Kasus Terpidana Mati Merri Utami Hingga Dapat Grasi

Jokowi”, detik.com, diakses 20 Juli 2024 dari

[https://news.detik.com/berita/d-6672274/perjalanan-kasus-terpidana-mati-](https://news.detik.com/berita/d-6672274/perjalanan-kasus-terpidana-mati-merri-utami-hingga-dapat-grasi-jokowi/3)

[merri-utami-hingga-dapat-grasi-jokowi/3](https://news.detik.com/berita/d-6672274/perjalanan-kasus-terpidana-mati-merri-utami-hingga-dapat-grasi-jokowi/3)